

BERFENOMENOLOGI MELALUI DEMOKRASI

Mengenal Wajah Tirani di dalam Demokrasi

Pengantar: Fenomenologi sebagai Alat Kerja

Sekitar pertengahan tahun 2012, dalam sebuah seminar filsafat politik yang diadakan di pinggir Danau Toba Samosir, di sela-sela sesi seminar ketika kami sedang beristirahat di kamar hotel sambil bercang-bincang santai, seorang kawan mengajukan pertanyaan menarik kepada saya yang kurang lebih dapat dirumuskan sebagai berikut: *Apakah demokrasi itu bersifat alamiah atau sosial?* Kebetulan kawan yang mengajukan pertanyaan ini akan memberikan bahan seminar mengenai ‘Tiga Gelombang Kapitalisme’ di sesi berikutnya. Kebetulan juga kawan penanya ini adalah seorang dokter senior yang entah mengapa, di tengah-tengah karir dokternya yang gemilang justru banting setir mendalami filsafat, khususnya filsafat fenomenologi dan filsafat politik.

Di saat santai ketika kami semua sedang rehat di tengah seminar yang cukup berat muatannya, pertanyaan itu memulai problematika yang serius, dan memulai ajang tukar pikiran yang seru. Walaupun telah berselang satu tahun lebih, bahkan saat inipun pertanyaan tersebut masih meminta perhatian serius. Meskipun pertanyaan di atas terkesan sederhana, namun di dalamnya termuat berbagai permasalahan dan pengandaian metodologis yang sama sekali tidak sederhana. Setiap pertanyaan, betapapun sederhananya, selalu memuat sebuah pergulatan pemikiran yang tidak sederhana dan karena itu selalu bersifat filosofis.

Pertanyaan di atas tidaklah sederhana sebab pertanyaan mengenai sifat demokrasi (alamiah atau sosial) membongkar secara bersamaan dua hal pokok: 1) realitas demokrasi itu sendiri sebagaimana terjadi saat ini di dalam kenyataan konkret, 2) kerangka pemahaman yang kita pakai dalam melihat/memahami sesuatu yang disebut demokrasi itu. Jika yang pertama berkenaan dengan pembongkaran di wilayah faktual-empiris, maka yang kedua berkenaan dengan pembongkaran di wilayah konseptual-filosofis. Jika wilayah yang pertama berkenaan dengan *struktur dunia* beserta segala konstruksi nilai yang menghidupinya, maka wilayah yang kedua berkenaan dengan *struktur*

kesadaran beserta segala konstruksi pemahaman yang menaunginya. Dalam bahasa fenomenologi, pertanyaan tersebut menuntut bahkan ‘memaksa’ kita untuk menanggukkan sejenak segala pemahaman, kepercayaan, dan klaim kebenaran yang telah kita miliki dan selama ini kita terima begitu saja.

Penanggukan atau penundaan metodologis inilah yang dalam istilah fenomenologi disebut sebagai *epoché* atau reduksi fenomenologis.¹ Penanggukan atau penundaan fenomenologis ini secara mendasar mempersoalkan serta membongkar klaim kesahihan (validitas) yang melekat di dalam struktur dunia dan struktur kesadaran yang telah mengendap tersedimentasi dan selama ini diandaikan begitu saja tanpa dipertanyakan. Ciri mendasar *epoché* inilah yang membuat metode fenomenologi disebut sebagai metode filsafat dengan cirinya yang *radikal* dan *revolusioner*.² Disebut radikal sebab yang dipersoalkan adalah pengandaian paling dasar yang menjadi fondasi utama serta menopang suatu struktur (dari yang kecil seperti struktur gelas yang sedang kita pakai untuk minum, hingga yang besar seperti struktur masyarakat tempat kita hidup). Disebut revolusioner sebab pendekatan filosofis ini membawa pada pergeseran atau perubahan cara pandang dunia serta cara pandang diri yang menyeluruh dan mendalam.

Dalam fenomenologi, pertanyaan tentang ‘demokrasi’ dapat diganti dengan apa saja, seperti misalnya ‘pohon’, ‘tanah’, ‘aku’, ‘diri’, ‘kuasa’, ‘hasrat’, dan lain sebagainya. Apapun subjek pertanyaannya, yang hendak dituju adalah pengandaian paling dasar atau lapisan terdalam yang memungkinkan sesuatu itu disebut sebagai sesuatu (misalnya ‘negara’, mengapa ‘negara’ disebut sebagai ‘negara’). Fenomenologi hendak sampai kepada dasar dari sesuatu dengan terlebih dahulu menunda segala opini, penilaian serta anggapan yang telah ada tentang sesuatu itu. Penundaan fenomenologis ini berangkat dari asumsi bahwa segala sesuatu pasti melewati proses pemahaman dan penafsiran manusia terlebih dahulu. Asumsi ini sesuai dengan prinsip dasar fenomenologi bahwa kesadaran manusia selalu merupakan kesadaran yang terarah kepada sesuatu (kesadaran-akan-sesuatu / prinsip intensionalitas).³

Prinsip dasar fenomenologi ini membawa pada dua konsekuensi penting: 1) dunia telah selalu memberikan diri bagi kesadaran melalui cara/bentuk pemahaman yang tertentu, 2) kesadaran telah

selalu terarah/mengarahkan diri kepada realitas (dunia) yang tertentu dan konkret. Di dalam kajian sejarah Filsafat Barat, dua konsekuensi fenomenologi yang tampaknya sederhana ini membawa pada terobosan serta perubahan cara pandang yang luar biasa dalam tradisi Filsafat Modern.

Fenomenologi Sosial-Politik: Realitas sebagai Konstruksi Intersubjektif

Terobosan fenomenologi itu meliputi dua hal utama. *Yang pertama*, setelah fenomenologi, filsafat tidak lagi menerima begitu saja klaim netralitas dan objektivitas murni dari ilmu-ilmu alam (sains). Setelah fenomenologi, segala klaim objektivitas mutlak tidak punya tempat lagi di dalam filsafat. Bagi fenomenologi, tidak ada objektivitas tanpa peran konstitutif kesadaran subjek. Di balik setiap bangunan realitas objektif selalu berdiri subjek yang memahami, menafsir, dan memutuskan. Fenomenologi memberi nama bagi objektivitas yang anonim. *Yang kedua*, setelah fenomenologi, filsafat tidak melulu asyik berkutat dengan manusia yang dipahami semata-mata sebagai aktus kesadaran. Fenomenologi dapat dikatakan menuntaskan tradisi filsafat kesadaran yang mengasalkan seluruh realitas kepada aktus kesadaran subjek yang mutlak dan menyeluruh. Setelah fenomenologi, idealisme dan subjektivisme tidak lagi memiliki tempat legitim di dalam filsafat. Sebab, kesadaran selalu merupakan kesadaran-akan-sesuatu (intensional), dan karena itu selalu bersifat terbuka, yaitu terarah kepada realitas konkret yang berbeda dari dirinya sendiri. Sifat terbuka kesadaran ini mengandaikan diterimanya keluasan realitas (dunia) sebagai suatu fakta ontologis.

Setelah fenomenologi, filsafat sampai pada pemahaman bahwa objektivitas dan subjektivitas adalah dua hal yang berkelindan satu sama lain. Yang satu tidak akan ada tanpa yang lain. Saling keterpautan sejajar antara realitas (objektivitas) dan manusia (subjektivitas) inilah yang disebut sebagai intersubjektivitas. Itulah sebabnya dalam fenomenologi perlu selalu dibedakan terlebih dahulu antara *kesadaran kita akan sesuatu* (1) dan *sesuatu itu sendiri* (2). Fenomenologi menemukan bahwa realitas selalu merupakan realitas yang kita sadari, kita tafsirkan, dan kita maknai sebagai sesuatu. Tidak ada realitas yang murni objektif sebagaimana diklaim oleh ilmu-ilmu sains. Realitas telah selalu bersifat intersubjektif. Dengan demikian, realitas telah selalu sarat dengan muatan opini, anggapan, nilai-nilai, serta berbagai asumsi historis yang berjubel di dalamnya. Dengan kata lain, realitas itu merupakan

hasil konstitusi pemahaman manusia sebagai subjek. Manusia sebagai subjek berarti juga manusia yang telah selalu berinteraksi dengan manusia-manusia lainnya, dan juga telah selalu berinteraksi dengan dunia yang berusaha dipahami/dimaknainya. Dalam bahasa fenomenologi, realitas (khususnya realitas sosial) selalu merupakan hasil konstruksi manusia, dibangun oleh manusia-manusia konkret, dibentuk oleh upaya manusia.⁴ Realitas dibangun di atas pemahaman serta kesadaran manusia yang berlapis-lapis. Mengurai lapisan-lapisan realitas ini sampai kepada dasarnya yang paling mendasar, inilah program utama fenomenologi. Inilah juga mengapa fenomenologi, sebagaimana dimulai oleh Edmund Husserl, memiliki satu semboyan yang terkenal, yaitu: *zurück zu den Sachen selbst* (*back to the things themselves* / *kembali kepada hal-hal atau sesuatu itu sendiri*).⁵

Mempertanyakan Sifat Dasar Demokrasi

Kembali kepada demokrasi sebagai pokok persoalan tulisan ini, mempertanyakan sifat dasar demokrasi (apakah alamiah atau sosial) berarti juga mempersoalkan apakah demokrasi itu sesuatu yang bersifat niscaya (*necessity*) dan karena itu diandaikan dapat berlaku universal di manapun kapanpun, ataukah sesuatu yang bersifat kemungkinan (*possibility*) dan karena itu relatif keberlakuannya. Pertanyaan di atas memang harus diakui agak berbahaya dan tidak populer, sebab dapat dengan mudah disalahartikan sebagai pertanyaan yang anti-demokrasi dan relativistik. Namun bukan berarti pertanyaan tersebut terlarang untuk diajukan. Pertanyaan apapun, bahkan yang tidak populer dan anti-demokrasi sekalipun, layak diajukan karena sifatnya yang diagnostik dalam melihat realitas. Justru untuk sampai kepada pemahaman yang utuh dan autentik mengenai demokrasi, maka perlulah pertanyaan-pertanyaan yang tampak berbahaya diangkat ke permukaan dan dihadapi langsung.

Pandangan pertama tentang demokrasi sebagai *keniscayaan* bertolak dari pengandaian bahwa demokrasi adalah sesuatu yang bersifat alamiah (*natural*),⁶ sama alamiahnya dengan pergantian musim ataupun proses kehidupan (kelahiran – pertumbuhan – kematian). Sebagai sesuatu yang alamiah, maka demokrasi adalah sesuatu yang niscaya, sama niscayanya dengan hukum daya-tarik bumi (*gravity*). Karena setiap insan manusia, dari dalam dirinya sendiri, telah selalu menghasrati

kemandirian (*self-governance*), kesetaraan (*equality*), dan kesejahteraan (*prosperity*), maka demokrasi menjadi bentuk sistem sosial-politik yang niscaya dituju dan dicapai oleh setiap bangsa manusia.⁷ Pengandaian yang sama juga menjadi dasar bagi para pemikir modern (misalnya Adam Smith) untuk menetapkan pasar sebagai sistem ekonomi-sosial yang niscaya untuk menjembatani antara kepentingan-diri (*self-interest*) dan stabilitas tatanan (*order*). Klaim keniscayaan dan kealamiah yang sama juga diajukan oleh Karl Marx untuk memperlihatkan bahwa revolusi proletariat dan masyarakat komunis (sistem komunisme) adalah sesuatu yang niscaya tercapai. Disebut niscaya sebab mekanisme ketimpangan serta penindasan yang terjadi dalam masyarakat kapitalis dengan sendirinya (secara alamiah) akan membawa pada revolusi dan masyarakat tanpa kelas (artinya setara satu sama lain).

Pandangan yang memuat klaim keniscayaan dan klaim kealamiah seperti di atas pada umumnya memuat satu ciri khas yang sama, yaitu memandang hukum alam sebagai hukum universal yang berlaku mutlak, dan karena itu juga mengikat kesadaran manusia secara deterministik. Walaupun mengandung kebenaran, namun cara-pandang naturalistik seperti ini memuat sesat logika yang cukup fatal. Bagi cara pandang seperti ini tidak ada perbedaan hakiki antara dunia alamiah (sebagai objek-objek) dengan dunia manusia (sebagai subjek). Yang perlu dicermati dalam cara pandang ini adalah adanya kecenderungan untuk mengalamiahkan segala sesuatu, dan menjadikan hukum alam sebagai alat pembenaran argumentasinya.⁸ Kecenderungan ini melupakan perbedaan dasar di antara struktur dunia objektif dan struktur kesadaran subjektif, masing-masing dengan status ontologis serta cara berada (*existence*) yang berbeda pula. Di balik kecenderungannya ini, cara pandang naturalistik memuat asumsi *sikap alamiah* yang menyamaratakan begitu saja status cara berada antara objek-objek alam dan subjek manusia. Hal pokok yang kemudian terlupakan adalah sifat intensional kesadaran subjek yang telah selalu sadar-akan-sesuatu. Sehingga, dunia objek tidak pernah begitu saja terberikan (*taken for granted*) bagi manusia secara otomatis-mekanis, melainkan telah selalu terberikan melalui proses konstitusi dan konstruksi kesadaran yang tertentu. Inilah asal-muasal dari munculnya realitas sosial dan kultural yang di dalamnya manusia tidak hanya pasif (dan naif) menerima realitas, melainkan aktif (dan kritis) memaknai realitas, sesuai dengan pemahamannya akan realitas tersebut. Cara berada kesadaran manusia yang khas inilah yang memampukannya untuk berjarak dari

dunia objek-objek material, untuk kemudian secara merdeka menentukan sikap (memilih) dan membangun dunianya sendiri.

Pandangan kedua tentang demokrasi sebagai *kemungkinan* lebih melihat demokrasi sebagai suatu realitas sosial-historis yang khas manusia, dan jatuh-bangun melewati proses formasi/pembentukannya di dalam perjalanan sejarah peradaban manusia. Kata ‘kemungkinan’ dalam konteks ini menjadi penting. Kata ‘kemungkinan’ memuat pengandaian bahwa manusia selalu menghadapi dunianya sebagai suatu ketidakterbatasan dan keterbukaan. Dunia manusia adalah satu kemungkinan dari berbagai kemungkinan yang tidak terbatas. Dunia manusia itu menjadi mungkin karena manusia menyadari kemungkinannya, untuk kemudian memilih, menetapkan batas, dan mengupayakan dunianya itu di antara sekian banyak pilihan kemungkinan yang tidak terbatas. Dalam bahasa fenomenologi, dunia yang aktual (*actual world*) merupakan satu bentuk perwujudan dari dunia yang mungkin (*possible worlds*), ia memiliki akar asal-usulnya di dalam cakrawala kemungkinan realitas yang tidak terbatas.⁹

Perumusan fenomenologis ini berangkat dari asumsi dasar fenomenologi bahwa kesadaran manusia selalu bergerak keluar dari dalam dirinya sendiri ke arah realitas (*ex-sistere*), bergerak menuju kepada realitas *yang lain* dari dirinya sendiri. Intensionalitas kesadaran inilah yang memunculkan keterarahan (atau juga: keterbukaan) manusia yang tidak terbatas, keterarahan pada orang lain, keterarahan pada masa depannya, pada risiko-risikonya, pada pengetahuannya, pada keputusannya, dan lain-lain. Keterarahan atau keterbukaan kesadaran yang tidak terbatas inilah yang menjadi asal-usul dari munculnya kebebasan dan tanggungjawab manusia. Hanya jika manusia terarah pada kemungkinan cara beradanya yang tidak terbatas, maka mungkin pula baginya untuk menetapkan batas serta memilih. Pilihan dan kapasitas untuk menetapkan batas, dua hal inilah yang menjadi asal-usul ontologis dari kebebasan dan tanggungjawab. Memang manusia adalah makhluk alamiah yang terikat oleh keniscayaan hukum-hukum alam. Tetapi manusia disebut sebagai manusia bukan karena ia sekadar *organisme* alamiah saja, melainkan karena manusia adalah makhluk *eksistensial* yang terarah pada ketidakterbatasan kemungkinan cara beradanya, memiliki kapasitas memilih dan mengambil tanggungjawab.

Menyebut demokrasi sebagai suatu kemungkinan bukan berarti merelatifkan pentingnya demokrasi, melainkan lebih menekankan pada kesadaran bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang niscaya (alamiah belaka), tetapi merupakan satu dari sekian banyak kemungkinan yang telah kita pilih dan terhadapnya kita bertanggungjawab. Ini juga berarti kita menyadari bahwa demokrasi bukanlah barang (komoditas) jadi yang dapat dipasang atau dilepas di mana saja dan kapan saja layaknya keran air, melainkan lebih merupakan suatu realitas atau ruang kehidupan (*Lebensraum*) yang kita pilih dan kita upayakan bersama. Kenyataan ini mengandaikan kesadaran bahwa demokrasi, sebagai suatu bentuk sistem kehidupan sosial-politik, merupakan hasil upaya-upaya manusia (baik pemikiran maupun tindakan) untuk menciptakan ruang kehidupan bersama yang terbaik di antara segala bentuk kemungkinan sistem sosial-politik lainnya. Ini juga berarti menyadari bahwa demokrasi disebut sebagai demokrasi persis karena ia mengandaikan adanya proses-proses yang khas manusia, seperti misalnya: *internalisasinya* di dalam kesadaran manusia dan *institusionalisasi/eksternalisasinya* ke dalam sistem yang efektif.¹⁰ Singkatnya, demokrasi merupakan hasil konstruksi manusia sebagai makhluk eksistensial dan makhluk sosial.¹¹

Sebagai suatu bentuk hasil konstruksi (lewat pemikiran dan tindakan) manusia, demokrasi memiliki baik asal-usul geografisnya yang historis-aktual maupun tujuannya yang ideal. Secara historis-aktual demokrasi berasal dari Yunani, dan sebagai sebuah konstruksi atau model tatanan sosial-politik untuk pertama kalinya diterapkan oleh negarawan Yunani yang bernama Solon (638 – 558 SM). Sebagai suatu bentuk model tatanan sosial-politik, demokrasi muncul karena adanya kesadaran akan satu hal penting, yaitu kesadaran akan kesetaraan politis, ekonomi, dan sosial. Inilah sebab mengapa Solon menerapkan hukum yang melarang perbudakan di antara sesama warga Negara (*polis*) Athena. Solon menyadari bahwa warga yang kehilangan akses politik ataupun ekonomi, dan kemudian menjadi budak, tidak akan bisa menjalankan peran politisnya.¹² Setelah Solon tonggak bersejarah berikutnya diciptakan oleh Clisthenes (570 – 508 SM), yang menerapkan demokrasi secara konkret di dalam sistem pemilihan umum Athena. Clisthenes adalah negarawan yang untuk pertama kalinya membagi Yunani ke dalam Daerah Pemilihan (*dapil*) yang murni politis, sehingga proses politik (demokrasi) tidak didominasi semata-mata oleh suara rakyat dari daerah-daerah pesisir pantai yang secara ekonomis lebih makmur.¹³ Melihat konteks historis-aktual di masa Yunani Purba ini, semakin

jelas terlihat bagaimana demokrasi dikonstruksi dan diupayakan dengan bertolak dari satu kesadaran mendasar, yaitu: kesadaran akan kesetaraan di antara sesama manusia. Kejeniusan para pemikir dan negarawan Yunani Kuno itu terletak pada kenyataan bahwa di masa yang begitu purba mereka telah memikirkan dan mengupayakan terbentuknya kesetaraan politis dan ekonomis.

Secara gagasan (ideal), demokrasi memiliki tujuan yang spesifik dan luhur, yaitu perlawanan terhadap tirani. Kesadaran akan pentingnya kesetaraan muncul sebagai suatu bentuk sikap (perlawanan) politis di hadapan tatanan politik (pemerintahan) yang dikuasai oleh seorang atau sekelompok penguasa yang memerintah sesuka kehendaknya (tiran / *tyrannos*). Tirani adalah suatu bentuk tatanan politik yang diperintah oleh kekuasaan mutlak (tanpa batas) dari satu atau beberapa kelompok orang, dan umumnya jenis kekuasaan ini bersifat sewenang-wenang/menindas. Pada umumnya rezim tiran justru membuat tatanan menjadi tidak stabil dan jatuh-bangun karena segelintir orang kuat bertarung dengan orang kuat lainnya untuk memperebutkan kekuasaan. Dalam kondisi ini kekuasaan menjadi tidak efektif, dan politik justru kehilangan intisarinya. Inilah sebabnya demokrasi, sesuai arti katanya (*demos*: rakyat; *kratein*: berkuasa), diupayakan sebagai suatu bentuk perlawanan terhadap tirani dengan mengusung prinsip dasar yang utama: pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk/demi rakyat. Prinsip dasar inilah yang tetap tinggal sebagai inti (*substance*) demokrasi dari zaman ke zaman, meskipun secara bentuk (*form*) demokrasi dapat terwujud ke dalam berbagai jenis pemerintahan yang berbeda-beda (misalnya: demokrasi parlementer, demokrasi republikan, demokrasi liberal, demokrasi sosial, demokrasi terpimpin, dan sebagainya).

Demokrasi dan Efek Sampingnya

Sebagai suatu bentuk perlawanan terhadap tirani, termasuk upaya untuk mengantisipasi agar tatanan tidak jatuh ke dalam pemerintahan totaliter, demokrasi adalah pilihan alternatif terbaik yang ada hingga saat ini. Sebagai suatu tatanan sosial-politik, demokrasi adalah produk konstruksi sosial yang paling cemerlang yang pernah dihasilkan dan diupayakan oleh manusia hingga saat ini. Tetapi kecemerlangan ini bukannya tanpa persoalan. Salah satu persoalan pelik yang perlu dihadapi adalah pertanyaan sebagai berikut: Apakah demokrasi sendiri sungguh terbebas (steril) dari tirani? Apakah

tidak mungkin rakyat itu sendiri (massa rakyat yang diagung-agungkan dalam demokrasi) menjadi tiranik? Mengingat bahwa setiap tatanan sosial-politik selalu bergerak dinamis dan dapat bergerak naik menjadi gemilang ataupun bergerak jatuh menjadi dekaden, bagaimanakah demokrasi mengantisipasi dirinya agar tidak terjatuh ke dalam bahaya tirani di masa depan?

Pertanyaan-pertanyaan ini semakin mendesak untuk dihadapi jika mengingat bahwa demokrasi itu dapat dengan mudah tergelincir ke dalam efek sampingan yang fatal, misalnya: proseduralisme pemilu, politik uang, banalitas (kedangkalan) politik, dan yang cukup penting adalah tirani mayoritas. Apabila tidak segera disadari dan segala efek samping itu mencaplok / mengkudeta substansi demokrasi, maka demokrasi itu sendiri dengan mudah berubah menjadi sebuah tirani yang sewenang-wenang bagaikan kanker yang menggerogoti tubuh induknya. Jika ini terjadi maka dengan mudah pula kata ‘rakyat’ itu sendiri bergeser artinya menjadi orang-orang yang tidak kompeten, para badut politik yang tidak tahu apa-apa selain mengejar kepentingan diri serta menumpuk uang pribadi, yang atas nama demokrasi bisa menduduki posisi-posisi strategis di sistem pemerintahan dan parlemen. Jika ini terjadi maka setiap warga Negara dapat dengan mudah menginternalisasi di dalam dirinya berbagai persamaan-persamaan logis yang sesat, seperti misalnya: demokrasi = uang, demokrasi = prosedur pemilu, demokrasi = media massa, demokrasi = semau gue, dan sebagainya. Keadaan seperti ini sesungguhnya bukan hanya suatu bentuk anarki dalam demokrasi, tetapi lebih parah lagi merupakan bentuk sekaratnya demokrasi dan awal menjangkitnya tirani.

Kecenderungan menyimpang dalam demokrasi inilah yang sebenarnya telah jauh-jauh hari disadari serta diwaspadai oleh para pemikir dan filsuf politik, sepertinya misalnya Alexis de Tocqueville dan Leo Strauss. Sebagai salah seorang ahli filsafat politik klasik, dalam salah satu karyanya mengenai asal-usul tirani, Leo Strauss mengatakan:

“Saat kita dibawa berhadap-hadapan dengan tirani, khususnya dengan bentuk tirani yang paling gawat yang bahkan tidak pernah terbayangkan oleh para pemikir di zaman dahulu, kajian ilmu politik masa kini justru gagal mengenalinya. [...] Berbeda dengan tirani di Zaman Klasik, tirani di zaman kita ini mengambil bentuk dalam rupa ‘teknologi’ maupun dalam rupa ‘ideologi’; dalam bahasa yang lebih umum, tirani masa kini justru mengandaikan keberadaan (justifikasi) ilmu-ilmu sains, atau tepatnya penafsiran yang tertentu atas ilmu.”¹⁴

Untuk lebih memahami maksud pernyataan Strauss di atas, kita hanya perlu membuka lembar sejarah masa lalu dan melihat bagaimana abad ke-20 ditandai oleh banyaknya lembar gelap bencana kemanusiaan hasil ciptaan manusia sendiri yang umumnya adalah produk dari eksperimen sosial-politik, produk dari pertarungan berbagai macam ideologi yang selalu mengatasnamakan kebenaran sains. Dalam konteks yang lebih kecil lagi, kita tinggal melihat bagaimana di dalam masa-masa pemilu atau pilkada, lembaga-lembaga *polling* berlomba-lomba memunculkan berbagai prediksi yang semuanya mengatasnamakan justifikasi ilmiah-objektif sains. Meskipun pada kenyataannya, mungkin saja di belakang lembaga *polling* yang ‘netral’ dan ‘objektif’ itu terjadi transaksi ataupun kesepakatan untuk membentuk opini publik demi memenangkan calon-calon tertentu.

Demokrasi yang didangkalkan hanya pada level transaksional prosedural seperti ini sebetulnya tidak lain dari pembodohan dan penipuan. Dalam situasi seperti ini, konsep ‘rakyat’ tidak lebih dari komoditas yang suaranya bisa dimanipulasi (misalnya lewat media massa) demi tujuan-tujuan sempit jangka pendek yang sebenarnya lebih berkaitan dengan upaya pengerukan uang daripada upaya politik. Politik yang telah terpelanting ke level *survival* dan transaksional ini dengan sendirinya membuat demokrasi tidak lebih dari bunyi-bunyian kosong yang telah kehilangan substansinya. Pada level ini sebenarnya hanya perlu sedikit tikungan kecil saja bagi demokrasi untuk sampai pada apa yang oleh Strauss disebut sebagai Caesarisme atau pemerintahan otoriter di tangan satu orang beserta segelintir penasihatnya. Bagi Strauss, Caesarisme memperoleh justifikasi dari bangkrutnya demokrasi, dan oleh karena itu justru merupakan tatanan yang legitim, jauh lebih legitim dari demokrasi! Disebut legitim sebab Caesarisme ini berdiri di atas ambruknya demokrasi autentik yang telah berubah bentuk menjadi tirani banalitas. Dalam kata-kata Strauss sendiri:

“Caesarisme selalu muncul hanya setelah tatanan republik yang konstitusional pecah berantakan. [...] Caesarisme secara mendasar terkait dengan masyarakat yang korup, terkait dengan kehidupan politik di tingkatnya yang paling rendah, terkait dengan bobroknya suatu masyarakat. Caesarisme mengandaikan ambruknya keutamaan-keutamaan warga Negara dan punahnya semangat publik. Caesarisme selalu hanya berlaku bagi masyarakat yang terdegradasi, atau sedang bergerak ke arah degradasi itu. Caesarisme selalu dapat memperoleh legitimasinya, sementara tirani tidak.”¹⁵

Kata-kata lugas Strauss ini tidak lain menunjukkan jalan lurus yang pasti akan dilalui demokrasi jika ia gagal mempertahankan prinsip dasar atau substansinya. Di saat kita melihat para politisi dan punggawa Negara justru sibuk dengan pencitraan diri/kelompok masing-masing (bukannya mengedepankan keputusan dan kepercayaan publik), di saat masyarakat tidak lagi bisa percaya kepada aparatus pemerintahan Negara, di saat uang menentukan segala-galanya dalam hidup publik bernegara, di saat kesenjangan ekonomi semakin melebar di antara yang mempunyai dan yang tidak mempunyai, di saat kelompok-kelompok garis keras keagamaan yang mengatasnamakan mayoritas bisa berbuat seenaknya, di saat itu sebenarnya kita sedang menyaksikan sendiri bagaimana demokrasi sedang mengalami pembusukan hingga ke akar-akarnya. Dengan kata lain, kita sedang menjadi saksi dari awal mula lahirnya tirani.

Di tahun 1835, jauh sebelum demokrasi menjadi jargon politik global seperti sekarang, saat Alexis de Tocqueville menerbitkan Bagian Pertama hasil perjalanan dan penelitiannya mengenai proses pembentukan demokrasi di Amerika Serikat, buku *Democratie en Amerique* jilid pertama itu meraih sukses sekaligus menimbulkan kontroversi hebat. Secara khusus Bab 13 dan 14 dari buku itulah yang menjadi pusat kontroversinya. Di dua bab itu, secara khusus Tocqueville mengangkat satu persoalan yang dilihatnya sebagai kecenderungan inheren (yang melekat) di dalam demokrasi Amerika, yaitu: tirani mayoritas. Apa yang dimaksud Tocqueville dengan tirani mayoritas adalah kekuasaan massa rakyat kebanyakan (misalnya lewat opini publik) yang berlaku mutlak sama mutlaknya seperti kekuasaan seorang penguasa tunggal atau tiran. Demokrasi, yang pada awalnya ditujukan sebagai perlawanan dan alternatif terhadap tirani, justru dapat menjadi persis seperti apa yang dilawannya itu. Sebagaimana ditulis Tocqueville:

“Menurut pendapat saya, keburukan utama dari institusi-institusi demokratis di Amerika Serikat tidak terletak pada kelemahan yang ada dalam institusi-institusi demokratik tersebut, tetapi justru terletak pada kedigdayaan mereka yang sulit ditandingi. Kebebasan yang sepertinya berlebihan di sana sama sekali tidak mengkhawatirkanku. Apa yang mengkhawatirkan justru tidak adanya perlawanan serta keamanan yang mencukupi (bagi setiap warga) untuk melawan tirani. [...] Kekuasaan tanpa batas yang dimiliki mayoritas, dan cara bagaimana keputusan-keputusan dieksekusi menurut preferensi mayoritas, ini tidak hanya membuat hukum menjadi tidak stabil, tetapi juga akan berdampak lebih jauh bagi pelaksanaan undang-undang dan tata cara pemerintahan.”¹⁶

Lebih jauh lagi, Tocqueville bahkan sampai pada kesimpulan yang mengejutkan:

“Seandainya republik demokratis layaknya Amerika Serikat dapat didirikan di belahan dunia lain, khususnya di belahan dunia di mana masyarakatnya telah terbiasa mendarah-daging dengan jenis kekuasaan oleh satu orang, saya tidak ragu-ragu menegaskan bahwa republik itu pastilah akan mengalami despotisme yang jauh lebih parah dari monarki-monarki di Eropa.”¹⁷

Jauh sebelum demokrasi menjadi keyakinan dunia internasional seperti sekarang, Tocqueville rupanya telah sejak awal menyadari bahwa demokrasi bukanlah resep ajaib yang bisa diekspor ke semua penjuru bumi untuk menyembuhkan berbagai penyakit sosial-politik di semua tempat. Justru karena demokrasi adalah sebuah konstruksi sosial, maka ia juga perlu dikonstruksi sesuai *sosialitas* (struktur masyarakat) dan *eksistensialitas* (suasana kebatinan) setiap negara-bangsa yang berbeda-beda. Mengabaikan kenyataan ini justru akan membuat demokrasi menjadi kontra-produktif, atau bahkan menghasilkan konsekuensi yang justru sama sekali berlawanan dengan cita-cita demokrasi, yaitu tirani. Dengan kata lain, jika kita andaikan demokrasi adalah sebuah mesin besar pemotong rumput di kebun, membiarkan mesin tersebut bekerja pada mekanisme *auto-pilot* justru dapat membuat kebun yang hendak ditata itu hancur berantakan, atau bahkan memakan korban para penghuni rumahnya sekalian. Di balik setiap mekanisme mesin, sebagaimana juga setiap sistem politik, selalu diandaikan keutamaan serta keputusan dari manusia-manusia konkret yang menjalankannya. Bukan sekadar manusia sebagai objek (konsumen) pembeo yang pasif-naif menjalankan apa saja yang ditawarkan oleh penjual. Lebih dari itu diandaikan manusia sebagai subjek yang mampu memilah, memilih, memutuskan, dan mengambil tanggungjawab.

Kenyataan ini menunjukkan satu hal penting bahwa jika berkaitan dengan efektivitas tatanan politik, kuncinya seringkali terletak pada keputusan politik dari manusia-manusia konkret yang menjalankannya. Tidak keliru jika pengandaian ini hendak disebut sebagai keprimeran/keutamaan yang politis.¹⁸ Sebab, orang bisa saja menyebut kunci dari keberhasilan tatanan politik (dalam hal ini demokrasi) terletak pada kesejahteraan serta kesetaraan ekonomi. Tetapi jalan untuk menjadi sejahtera, atau jaminan atas kesetaraan ekonomi itu, justru terlebih dahulu harus mengandaikan keputusan-keputusan politik yang memang mendukung dan menjaminnya. Demikian juga soal hukum dan keadilan: seringkali diandaikan bahwa kunci berhasilnya demokrasi terletak pada

efektivitas hukum dan sistem peradilan. Padahal, setiap undang-undang yang berlaku dan diterapkan di jalan-jalan selalu dibuat melalui keputusan politik. Keputusan politik (dalam konteks demokrasi adalah keberpihakan pada rakyat) menjadi dasar legitimasi dari setiap mekanisme sistem legal, sistem sosial, dan sistem ekonomi. Tanpa dasar legitimasi itu, setiap mekanisme sistem tak ubahnya mesin rusak yang kehilangan efektivitasnya. Di dasar legitimasi itu terletaklah manusia sebagai subjek yang menjadi sebab-musabab dari adanya (*raison d'être*) setiap konstruksi sosial. Setelah berlelah-lelah membahas demokrasi, mungkin pada akhirnya kita harus terpaksa dengan berat hati mengakui kebenaran diktum Thomas Hobbes yang sangat, atau bahkan terlalu, realistis, yaitu: *auctoritas, non veritas facit legem* (bukan kebenaran, melainkan otoritaslah yang menciptakan hukum).¹⁹ Persoalannya menjadi lebih pelik saat kita menyadari bahwa massa rakyat, rakyat banyak yang menjadi fondasi demokrasi itu, sebetulnya tidak terlalu peduli (bersikap masa bodoh) dengan kebenaran. Sebab, bagi rakyat yang 'banyak' itu kebenaran memang seringkali sulit diterima. Autoritas, pada kenyataannya, memang jauh lebih memikat dan jauh lebih didengar (dipatuhi) oleh rakyat kebanyakan. Bagi rakyat kebanyakan, tidak peduli apapun kebenaran (juga kesesatan) yang termuat di dalam tatanan atau ideologi tertentu, sejauh sistem itu efektif mendatangkan stabilitas dan menjanjikan kemakmuran/kejayaan, mereka akan mengikutinya. Demikian juga yang kebalikannya dapat terjadi, sejauh rakyat yang banyak itu kecewa atau tidak lagi percaya pada sistem sosial-politik yang menaungi mereka, sistem itu sendiri pada waktunya akan ditelan oleh logika massa yang cenderung tiranik. Dalam keadaan seperti ini, sadar atau tidak, masyarakat sebenarnya sedang menyiapkan jalan bagi hadirnya seorang atau sekelompok tiran.

Penutup: Beratnya Jalan Demokrasi

Jika naskah ini, atau tulisan-tulisan dalam buku ini, terdengar menyuarakan nada-nada yang sedikit 'minor' terhadap demokrasi, mengutip beberapa pemikir yang resisten terhadap demokrasi, itu bukan karena demokrasi pada dirinya sendiri ditolak atau dicerca. Kesimpulan seperti ini adalah kesimpulan gampang-gampang yang sungguh bodoh dan biasanya muncul dari ketidakberpikiran serta kemalasan berpikir. Apa yang hendak ditunjukkan bukanlah kesesatan atau kegagalan demokrasi *an*

sich. Sama sekali bukan. Lebih mendasar dari itu, apa yang hendak ditunjukkan adalah kenyataan bahwa kegagalan setiap sistem sosial-politik (dalam konteks ini demokrasi) adalah bentuk dari gagalnya pemahaman (serta pelaksanaan) kita atas sistem tersebut. Kegagalan demokrasi adalah kegagalan pemahaman kita atas demokrasi, bukan kegagalan demokrasi itu sendiri.

Cara pandang ini memuat keyakinan bukan kepada sistem *per se*, melainkan kepada manusia sebagai subjek yang menjadi dasar dari keberlangsungan sistem apapun. Apa yang ditolak bukanlah sistem itu sendiri, melainkan sikap alamiah atau pengandaian alamiah yang menerima begitu saja klaim kesahihan (validitas) dari suatu sistem. Cara pandang kritis ini tidak lain merupakan bentuk sikap fenomenologis yang mau mencari dasar dari realitas yang hadir/menampakkan diri bagi manusia. Dengan mempertanyakan kesahihan sikap alamiah dan segala klaim kealamiah di balik sistem, cara pandang fenomenologis-kritis menyadari bahwa realitas telah selalu mengandaikan pemahaman, penafsiran, serta keterlibatan manusia di dalamnya. Dengan demikian, setiap sistem sosial-politik-ekonomi, selalu merupakan suatu bentuk konstruksi dari manusia-manusia yang memahami, mengupayakan, dan mengadakannya. Oleh sebab itu, cara pandang fenomenologis melihat bahwa bobroknya cara berada suatu sistem (katakanlah sistem demokrasi) merupakan penampakkan dari bobroknya cara berada manusia-manusia yang menghidupi sistem tersebut. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa penyelesaian dari kebobrokan sistem tidak pertama-tama terletak pada perbaikan *mekanisme* sistem itu sendiri.

Lebih mendasar dari itu, penyelesaian dari segala persoalan sistemik justru terletak pada perbaikan mutu atau kualitas cara berada (pemahaman dan cara berpikir) dari manusia-manusia yang bertanggungjawab terhadap konstruksi sistem yang telah dipilih dan dibangunnya sendiri. Inilah sebabnya mengapa cara pandang fenomenologis menolak menerima begitu saja pengagung-agungan terhadap sistem. Sejak awal fenomenologi menyadari bahwa setiap tatanan akan selalu melibatkan intersubjektivitas di antara manusia-manusia yang terlibat, dan oleh karena itu setiap tatanan selalu merupakan konstruksi manusiawi. Segala sistem dan metode sains yang membawa-bawa klaim kebenaran alamiah dicurigai oleh fenomenologi, bahkan ditolaknyanya, karena tidak lain dari fiksi, sama fiktifnya seperti janji keselamatan surgawi/akhirat dalam agama apapun.

Pembongkaran fenomenologis ini memperlihatkan bahwa demokrasi, justru karena ia adalah konstruksi bersama yang mengandaikan kesadaran penuh beserta keterlibatan setiap warga, merupakan jalan politis yang berat. Tetapi beratnya jalan demokrasi bukan berarti ia tidak mungkin dilalui. Justru karena demokrasi merupakan kemungkinan yang telah dipilih dan ditegaskan, maka demokrasi, supaya efektif, menuntut pertanggungjawaban dari setiap orang warganya. Apabila kita enggan untuk bertanggungjawab, enggan untuk melewati jalan yang berat itu, maka lebih baik jika tatanan kemasyarakatan-kenegaraan dipasrahkan saja kepada tiran yang tidak akan segan-segan mengambil kesempatan di saat krisis.

Beratnya jalan demokratis ini memperlihatkan bahwa demokrasi pertama-tama lebih merupakan suatu sikap daripada sebuah sistem. Contoh bagus dapat kita lihat pada Kongres Partai Sosialis Jerman tahun 1959 di Godesberg tentang bagaimana sebaiknya Jerman pasca Perang Dunia II melewati jalan demokrasi. Pada kongres itu filsuf Ernst Boehme menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu format kenegaraan (*Staatsform*) mengenai bentuk negara, dan bukan isi substansi (*Staatsinhalt*) yang perlu dimiliki sebuah tatanan. Rumusan ini segera ditolak mentah-mentah oleh para peserta kongres. Rumusan yang lebih memuaskan baru diterima setelah ahli filsafat hukum Adolf Arndt memberikan definisi yang lebih mendasar. Dalam rumusan Adolf Arndt, demokrasi bukanlah pengertian yang netral, permanen, dan teratur, melainkan lebih merupakan suatu *sikap-bidup* yang ditegaskan/dipraktikkan setiap saat (*eine Lebenshaltung zu jeder Stunde*).²⁰ Rumusan Adolf Arndt ini menantang kita semua, dan mengharuskan kita bertanya pada diri sendiri masing-masing: sanggupkah kita melalui beratnya jalan demokrasi? ***

Tawangmangu, 16 Agustus 2014

Ito Prajna-Nugroho

Catatan-catatan Akhir

¹ Quentin Lauer, *Phenomenology: Its Genesis and Prospect* (New York: Harper Torchbooks, 1965), pp. 49-51.

² *Ibid.*, p. 20.

³ Edmund Husserl, "Philosophy as Rigorous Science," in Edmund Husserl, *Phenomenology and the Crisis of Philosophy*, translated with an Introduction by Quentin Lauer (New York: Harper Torchbooks, 1965), p. 90.

⁴ Peter L. Berger & Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality – A Treatise in the Sociology of Knowledge* (New York: Anchor Books / Doubleday & Company, Inc, 1967), pp. 15, 189.

⁵ Edmund Husserl, *Ideas Pertaining to Pure Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy*, translated by F. Kersten (The Hague: Martinus Nijhoff, 1982), pp. 8-11.

⁶ Paham seperti ini dikemukakan umumnya oleh para penganut demokrasi liberal, satu tokohnya yang terkenal adalah Francis Fukuyama. Bagi Fukuyama, demokrasi liberal merupakan 'akhir dari sejarah' dan ini adalah hal yang niscaya sebab liberalisme itu sendiri membuktikan diri sebagai ideologi yang paling ampuh bertahan setelah runtuhnya Komunisme Soviet. Lihat Francis Fukuyama, *The End of History and the Last Man* (New York: Free Press, 2006).

⁷ Klaim ideologis-saintifik yang membawa muatan alamiah pada dasarnya juga membawa klaim netralitas, sebagaimana alam itu sendiri adalah sesuatu yang netral. Pertanyaannya, apakah rumusan yang berlaku untuk tatanan alam ini dapat juga diberlakukan secara sejajar bagi tatanan manusia (sosial) seperti demokrasi? Faktanya, demokrasi sendiri justru sering menjadi dalih (*pretext*) bagi motif-motif politik yang sama sekali tidak demokratis, misalnya sebagai dalih bagi Negara-negara kuat untuk memperluas kekuasaan dan kepentingannya di Negara-negara berkembang. Lihat: James Mann, *Rise of the Vulcans – The History of Bush's War Cabinet* (New York: Penguin Books, 2004), pp. 91-99, 129-130.

⁸ Banyak dari filsuf-pemikir tentang hukum dan Negara yang mencoba memberikan pembenaran (justifikasi) ilmiah pada teori mereka dengan bertolak dari hukum alam dan cara pandang alamiah. Kecenderungan ini pada umumnya muncul pada permulaan abad ke-17 di masa-masa awal berkembangnya modernitas dan metode-metode sains. Satu pemikir besar filsafat hukum dan negara yang secara efektif berhasil menyejajarkan antara tatanan sosial dengan tatanan alam adalah Thomas Hobbes. Hobbes secara mengagumkan berhasil memperlihatkan bahwa sifat-alamiah manusia yang cenderung egois-individualistik dan anti-tatanan ternyata justru menjadi syarat kemungkinan yang niscaya bagi terbentuknya tatanan sosial. Pengandaian yang kurang lebih serupa juga akan dikemukakan oleh Immanuel Kant dalam buku *Zum ewigen Frieden (Menuju Perdamaian Abadi)*. Lihat J. J. von Schmid, *Abli-abli Pemikir Besar tentang Negara dan Hukum*, diterjemahkan oleh Mr. R. Wiratno dan Mr. Djamaluddin Dt. Singomangkuto (Jakarta: PT Pembangunan, 1954), hlm. 156-158. Lihat juga Immanuel Kant, *Menuju Perdamaian Abadi – Sebuah Konsep Filosofis*, diterjemahkan oleh Arpani Harun dan Hendarto Setiadi, dengan Pendahuluan oleh Prof. Franz Magnis-Suseno, SJ (Bandung: Penerbit Mizan & Goethe Institut).

⁹ Cornelis A. van Peursen, *Phenomenology and Reality* (Pittsburgh: Duquesne University Press, 1972), p. 99.

¹⁰ Peter L. Berger & Thomas Luckmann, *op. cit.*, pp. 48, 130.

¹¹ *Ibid.*, p. 49.

¹² A. Setyo Wibowo, “Demokrasi: Asal-usulnya di Yunani (1),” dalam Majalah *BASIS*, nomor. 07-08, tahun ke-62, 2013, hlm. 23-24.

¹³ *Ibid.*, hlm. 24.

¹⁴ Leo Strauss, *On Tyranny* (Chicago: The University of Chicago Press, 2000), p. 23.

¹⁵ *Ibid.*, pp. 178-179.

¹⁶ Alexis de Tocqueville, *Democracy in America*, translation by Henry Reeve, revised by Francis Bowen, abridged and with an Introduction by Patrick Renshaw (Hertfordshire: Wordsworth Editions Limited, 1998), pp. 100-101.

¹⁷ *Ibid.*, p. 108.

¹⁸ Prinsip dasar ini dikemukakan oleh tokoh nasionalis Pergerakan Kebangsaan, yang sekaligus juga mantan Ketua Presidium GMNI dan mantan anggota DPR-RI Fraksi PDI, Soedaryanto. Dalam berbagai diskusi saya dengan Pak Dar (sapaan akrab beliau) di rumahnya yang bersahaja di Bumi Serpong Damai, Tangerang, selalu terungkap penekanan beliau mengenai pentingnya ‘Keprimeran Yang Politis’ yang di dalamnya termuat legitimasi dasar dari adanya Negara sebagai penjamin ruang publik-politik. Tanpa ‘Yang Politis’ itu, baik tatanan sosial maupun tatanan ekonomi sebetulnya tidak akan berjalan semestinya. Dengan kata lain, ‘Yang Politis’ menjadi pengikat dan pendasaran dari ruang ekonomi dan ruang sosial. Secara filosofis kita bisa membandingkan konsep penting Pak Dar ini dengan konsep ‘*das Politische*’ sebagaimana diungkapkan oleh filsuf politik Carl Schmitt. Lihat: Carl Schmitt, *Political Theology – Four Chapters on the Concept of Sovereignty*, translated by George Schwab (Cambridge: The MIT Press, 1988). Lihat juga: Ito Prajna-Nugroho, *Fenomenologi Politik – Membongkar Politik Menyelami Manusia* (Purworejo: Sanggar Pembasisan Pancasila, 2013), hlm. 51-67.

¹⁹ Thomas Hobbes, *Leviathan*, edited with an Introduction by C. B. Macpherson (Penguin Books, 1974), pp. 322-323.

²⁰ Lihat Sindhunata, *Sakitnya Melahirkan Demokrasi* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2000), hlm. 10.